

## Rekapitulasi penyampaian LHKAN RSUD HUSADA PRIMA

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan  
Pengawasan  
di

Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK/WBBM) dan pengusulan RSUD Husada Prima tahun 2023, dengan ini kami sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut:

### REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI RSUD HUSADA PRIMA TAHUN 2023

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	4
	b. Tidak Wajib LHKPN	201
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>telah</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	4
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>belum</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>telah</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	201
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>belum</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan a. PNS b. PPPK	a. 0 b. 0
6.	Jumlah Aparatur Negara yang <b>belum</b> menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0

Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD HUSADA PRIMA



drg. Dyah Retno A. Puspitorini, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19660415 199402 2 001

Tembusan:

Yth. Inspektur Provinsi Jawa Timur